

**SKRIPSI**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH  
DESA PLAMPANG, KECAMATAN PLAMPANG  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**



**DISUSUN OLEH :**

**CAHYADI KURNIAWAN**  
**NIM. 216130039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH DESA  
PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2018



PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi  
Mataram, 12 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Abdurrahman'.

Drs. H. Abdurrahman, MM  
NIDN.0804116101

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ilham Zirti'.

Ilham Zirti S.IP, M.IP  
NIDN.0817119102

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ayatullah Hadi'.  
Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP.  
NIDN. 0816057901

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH DESA  
PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2018

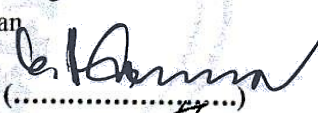




Disusun dan diajukan Oleh

**CAHYADI KURNIAWAN**  
NIM. 216130039


PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 18 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

1. **Drs H.Abdurrahman, MM** (PU)   
NIDN.0804116101
2. **Ilham Zirti S.IP,M.IP** (PP)   
NIDN. 0827118801
3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.IP** (PN)   
NIDN. 0825038303

Mengetahui,  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,



  
(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)  
NIDN. 0806066801

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : CAHYADI KURNIAWAN

NIM : 216130039

Judul Skripsi : “Perencanaan Pembangunan Infarstruktur Desa Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 17 Januari 2020

Penulis,



Cahyadi Kurniawan

NIM. 216130039





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyadi Kurniawan  
NIM : 216130039  
Tempat/Tgl Lahir : Plampang 30 April 1997  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 085 338 773 169  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH DESA PLAMPANG, KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Penulis



Cahyadi Kurniawan  
NIM. 216130039

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Hidup Untuk Menata Masa Depan, Baik Dunia Dan Akhirat”



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hasil perjuangan yang melelahkan, teriring dengan waktu, kesabaran, ketekunan dan do'a serta wujud kasih sayang yang tak terkira, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Allah SWT yang memberikan nikmat tanpa batas dan Tauladan terhebat Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Mu'robbi terbesar dalam hidupku.
- Rasa hormat, sayang dan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda (Muhammad Nur) dan ibunda (Nurhayati) yang tidak pernah merasa lelah memberikan doa, kasih sayang, pengertian, dorongan semangat, materi, support dan bimbingan untukku.
- Sahabat terbaikku: Ahmad Nurdani, Dwi Nilam Sari, Dollen Abdullah Amd.
- Dan teman seperjuangan kelas IP B Ilmu Pemerintahan 2016 yang selalu saling merangkul satu sama lain.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat anugrahnya dan kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Perencanaan Pembangunan Infarstruktur Desa Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018”**.

Proposal Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mata ram khususnya program studi pemerintahan dan syarat untuk penyusunan Skripsi untuk mencapai gelas Sarjana Stara Satu (S1)

Dalam penyelesaian penulisan proposal ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberi dorongan bimbingan dan pengarahan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, MM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.
5. Bapak Ilham Zirti, S.IP.,M.IP., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.
6. Semua Dosen yang telah mendidik penulis dari semester awal hingga akhir.
7. Kedua orang tua ku yang selalu saya banggakan serta keluarga besar yang selalu menjadi motivator utama dan selalu mendoakan, memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna baik bagi segi sisi maupun penulisan. Untuk itu penulis sangat

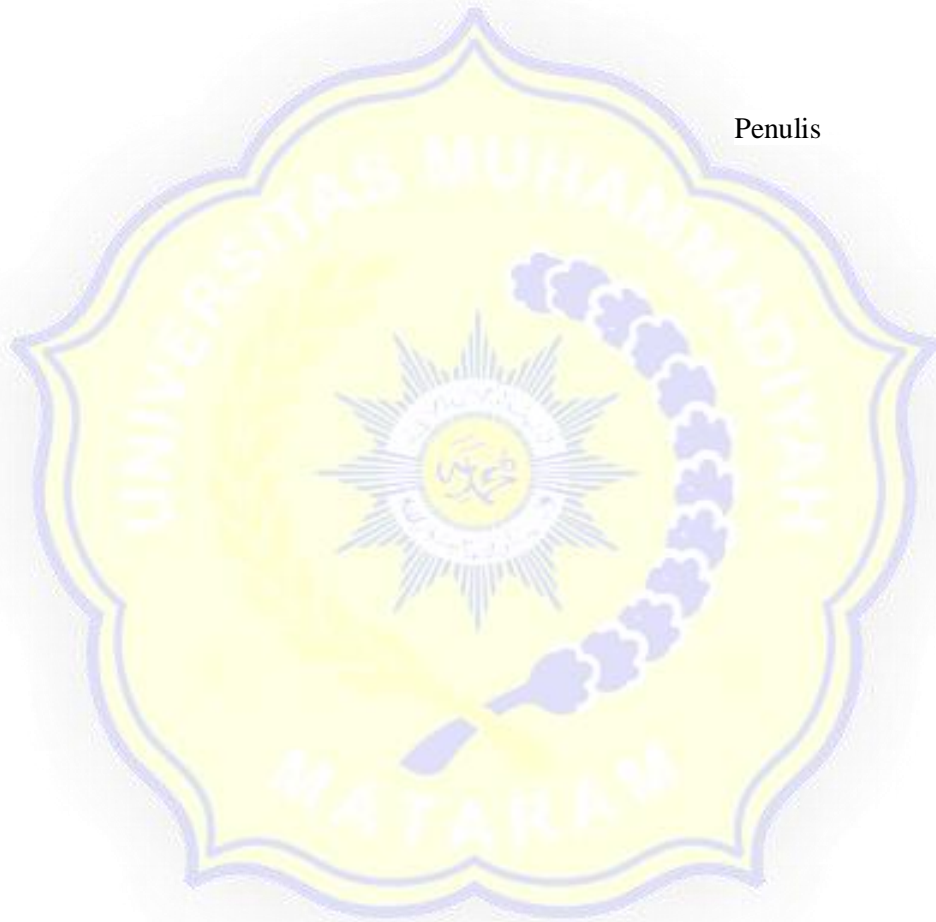


mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dengan ikhlas dari semua pihak demi menyempurnakan ke tahap selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Mataram, Agustus 2020

Penulis



## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur desa dan efektifitas murembangdesa dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan memusatkan perhatian pada masalah yang ada, dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Adapun hasil dalam penelitian ini dalam yaitu penyusunan konsep perencanaan pembangunan Desa Plampang melakukan dua tahap yakni dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), dalam pelaksanaan program pembangunan Desa Plampang masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, drainase, air bersih dan listrik. Adapun penyebab terjadinya tidak terealisasi pembangunan infrastruktur infrastruktur jalan, irigasi, drainase, air bersih dan listrik di Desa Plampang yaitu dikarenakan adanya peristiwa gempa bumi pada tahun 2018 dan dana desa serta dana bantuan gempa bumi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten pada tahun 2019, pemerintah Desa Plampang hanya berfokus pada pembangunan permukiman warga. Maka dari itu pemerintah Desa Plampang diharapkan Pemerintah diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Plampang khususnya dalam infrastruktur di Desa Plampang.

**Kata Kunci : Konsep Perencanaan, Infrastruktur Desa, Partisipasi, MUSREMBANG**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine how village infrastructure development planning and the effectiveness of Musreimbang in Village Infrastructure Development Planning Based on the Conditions and Potential of Plampang Village, Plampang District, Sumbawa Regency in 2018. In this study, the writer used qualitative methods by focusing on existing problems. The basis of the research used is interviews with sources or informants containing questions about matters related to the formulation of research problems. The results of this study include the preparation of the Plampang Village development planning concept, which are in two stages, namely by compiling a Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) for five years, and an Annual Village Development Plan or what is called the Village Government Work Plan (RKP), in its implementation. The Plampang Village development program the community participates in the process of building road infrastructure, irrigation, drainage, clean water, and electricity. The reason for the unrealized development of road infrastructure, irrigation, drainage, clean water, and electricity in Plampang Village is due to an earthquake in 2018 and village funds and earthquake assistance funds from the provincial and district governments in 2019. The Plampang Village government only focuses on building residences. Therefore, the Plampang Village government is expected to give full attention to the implementation of infrastructure development in Plampang Village, especially the infrastructure.*

**Keywords** : **Planning Concept, Village Infrastructure, Participation, MUSREMBANG**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	14
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
2.2 Landasan Teori .....	22
2.2.1 Konsep Perencanaan Pembangunan .....	22
2.2.2 Pembangunan Desa.....	28
2.2.3 Desa .....	29
2.2.4 Unsur-unsur Desa .....	30
2.2.5 Infrastruktur Pedesaan .....	31
2.2.5.1 Infrastruktur .....	31
2.2.5.2 Infrastruktur Pedesaan .....	32
2.2.6 Partisipasi Masyarakat .....	37



2.2.6.1. Pengertian Partisipasi .....	37
2.2.6.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	39
2.2.6.3. Tipe Peran Seta Masyarakat .....	41
2.2.6.4. Bentuk dan Wujud Peran Serta dalam Pembangunan .....	44
2.2.7. Perencanaan Pembangunan Partisipatif .....	44
2.2.7.1. Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) .....	44
2.2.7.2. Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif .....	47
2.2.7.3. Dasar Hukum Musrenbang .....	48
2.2.7.4. Perlibatan Masyarakat atau Peserta dalam Musrenbang .....	48
2.2.7.5. Peran dan Kedudukan Musrenbang .....	49
2.2.8. Efektivitas Perencanaan .....	50
2.2.8.1. Pengertian Efektivitas .....	50
2.2.8.2. Tingkat Efektivitas Perencanaan .....	51
2.2.8.3. Efektivitas Musrenbangdes dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah .....	53
2.3 Skema Pemikiran dalam Penelitian .....	55
2.4 Definisi Konseptual .....	56
2.5 Defenisi Operasional .....	58
<b>BAB III METODEDE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	60
3.2 Lokasi Penelitian .....	60
3.3 Informan Penelitian .....	61
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.5. Sumber Data .....	67
3.5.1 Data Primer .....	67
3.5.2 Data Sekunder .....	68
3.6. Teknik Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	
4.1. Gambaran Umum Desa Plampang .....	71
4.1.1. Sejarah Desa Plampang.....	71
4.1.2. Kondisi Geografis Desa Plampang.....	72

4.1.3 Struktur Pemerintah Desa Plampang.....	75
4.1.4 Kependudukan.....	77
4.2. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa Plampang .....	80
4.2.1 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Plampang.....	83
4.2.2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Plampang.....	94
4.3 Perencanaan Infrastruktur Desa Plampang .....	100
4.3.1 Kondisi Infrastruktur Jalan .....	108
4.3.2 Kondisi Infrastruktur Listrik .....	114
4.3.3 Kondisi Infrastruktur Drainase.....	117
4.3.4 Kondisi Infrastruktur Air Bersih .....	122
4.3.5 Kondisi Infrastruktur Irigasi.....	127
4.3.6 Fasilitas Publik .....	132
4.3.6.1 Sarana Pendidikan .....	132
4.3.6.2 Sarana Peribadatan.....	136
4.3.6.3 Sarana Kesehatan.....	140
4.4. Perencanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pengembangan Potensi Wilayah.....	142
4.4.1. Pemahaman Tentang Kondisi Umum Masyarakat Desa Plampang...	150
4.4.2. Pemahaman SDM Dalam Partisipasi Masyarakat .....	153
4.4.2.1 Individu .....	153
4.4.2.2 Komunal atau Kelompok .....	156
4.5 Musrempang Desa Plampang .....	158
4.5.1 Orientasi Pada Lingkungan.....	164
4.5.2 Alokasi Sumber Daya Optimum.....	165
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>167</b>
5.1. Kesimpulan .....	167
5.2. Saran.....	169

## DAFTAR TABEL

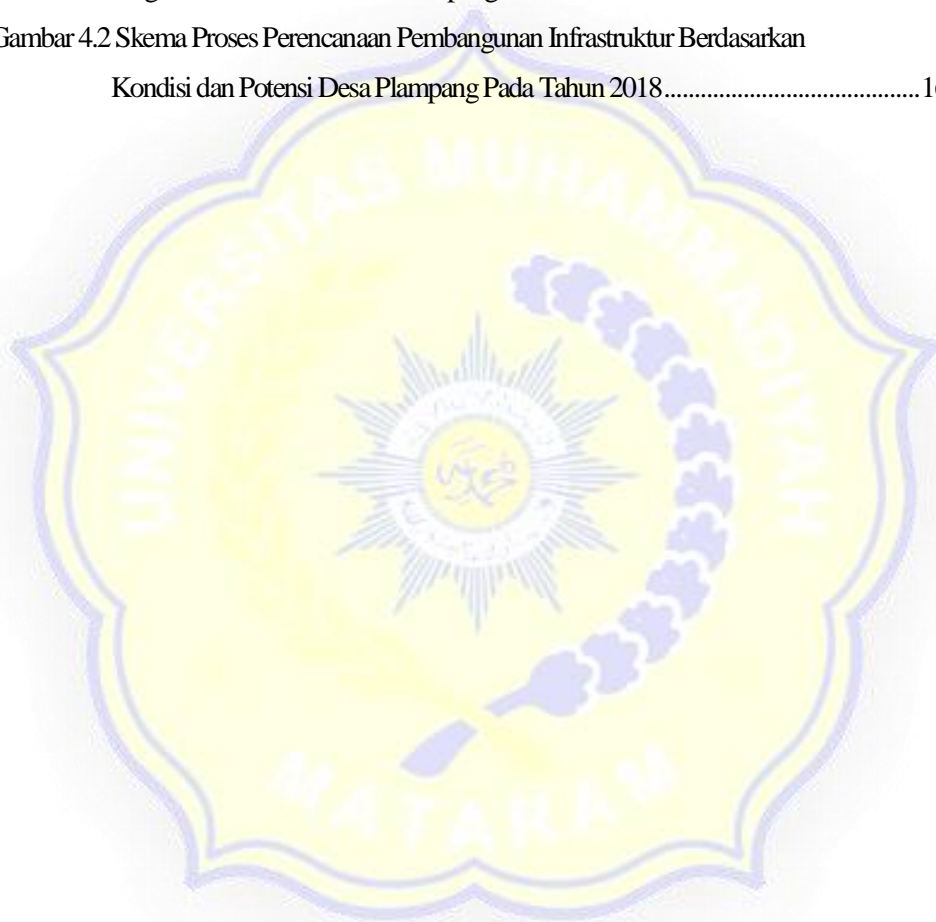
Tabel 1.1 Pendapatan Desa Plampang .....	8
Tabel 1.2 Hasil Produksi Sektor Pertanian di Desa Plampang .....	10
Tabel 2.1 Defenisi Operasional .....	58
Tabel 3.1 Jumlah Informan Atau pun Narasumber di Desa Plampang Tahun 2020 .....	67
Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Plampang .....	74
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Desa Plampang Pada Tahun 2018.....	77
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Plampang Pada Tahun 2018.....	78
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Plampang Pada Tahun 2018.....	79
Tabel 4.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Plampang Pada Tahun 2014 sampai 2019.....	90
Tabel 4.6 Pendapatan Desa Plampang .....	96
Tabel 4.7 Anggaran Rencana Pembangunan Infrastrktur Desa Plampang Tahun 2018.....	103
Tabel 4.7 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Plampang Pada Tahun 2018.....	110
Tabel 4.8 Panjang Jalan Aspal dan Rusak pada Tahun 2018 dan 2019.....	113
Tabel 4.9 Data Kegunaan Listrik di Desa Plampang Tahun 2018.....	116
Tabel 4.9 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Drainase Di Desa Plampang Pada Tahun 2018.....	120
Tabel 4.10 Panjang Drainase di Desa Plampang .....	121
Tabel 4.11 Kebutuhan Jaringan Air Bersih .....	123
Tabel 4.12 Kebutuhan Jaringan Air Bersih di Desa Plampang .....	123
Tabel 4.13 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Di Desa Plampang Pada Tahun 2018.....	125

Tabel 4.14 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Irigasi Di Desa Plampang Pada Tahun 2018 .....	130
Tabel 4.15 Hasil Produksi Sektor Pertanian di Desa Plampang .....	131
Tabel 4.16 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana Pendidikan Di Desa Plampang Pada Tahun 2018 .....	135
Tabel 3.17 Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran.....	136
Tabel 4.18 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana Peribadatan Di Desa Plampang Pada Tahun 2018 .....	138
Tabel 4.19 Standar kebutuhan Infrastruktur Sarana Peribadatan Di Desa Plampang Pada Tahun 2018 .....	139
Tabel 4.20 Daftar Nama-Nama Keikutsertaan Dalam Pelaksanaan Murembangdes Desa Plampang .....	146
Tabel 4.21 Analisa Usia dan Pendidikan Peserta Musrembangdes Tahun 2018	153
Tabel 4.22 Analisa Mata Pecaharian Peserta Musrembangdes Plampang Tahun 2020 .....	155
Tabel 4.23 Rencana Kegiatan Infrastruktur Pedesaan (Jalan, Air Bersih, Irigasi Dan Drainase) Desa Plampang Melalui Musrembang Pada Tahun 2018 .....	156
Tabel 4.24 Orientasi Usulan Musrenbangdes Terhadap Lingkungan.....	164
Tabel 4.25 Alokasi Sumber Daya Secara Optimum.....	165



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi jalan di Desa Plampang Tahun 2020 .....	9
Gambar 3.1 Peta Batas Administrasi Desa Plampang .....	61
Gambar 4.1 Bagan Struktur Pemerintah Plampang.....	76
Gambar 4.2 Skema Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Kondisi dan Potensi Desa Plampang Pada Tahun 2018.....	162



# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, disebutkan bahwa dalam penataan ruang terdapat 3 (tiga) tahapan yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahapan awal dan memiliki posisi penting dalam mengendalikan harkat dan derajat hidup manusia. Dalam melakukan sebuah pembangunan di suatu wilayah maupun desa yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan suatu upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawa harapan baru kepada pemerintah dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa secara tidak langsung mendorong pemerintah desa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya, beberapa desa telah mampu membawa perubahan menjadi desa terbaik di Indonesia, yaitu Nagari (desa adat) Sungai Nyalo di Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar), begitu juga dengan Desa Madobak di Kepulauan Mentawai (Sumbar), Desa Tamansari di Banyuwangi (Jatim), Desa Pujon Kidul di Malang (Jatim), Desa

Seigentung di Gunung Kidul (Yogyakarta), Desa Ubud di Gianyar (Bali), Desa Waturaka di Ende (NTT), Desa Ponggok Klaten (Jateng), Desa Teluk Meranti Pelalawan (Riau), Desa Bontagula di Bontang (Kaltim).

Cara yang digunakan di Indonesia dalam pembangunan desa adalah meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan sosial ekonomi serta membangun prasarananya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) adalah alam, manusia, letak desa, mata pencaharian, produksi, adat, kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan administrasi. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk desa yang ada sangat mempengaruhi usulan kegiatan infrastruktur pedesaan tersebut, bentuk- bentuk desa yang ada seperti desa memusat pegunungan, memusat fasilitas, bentuk desa linear ataupun desa tepi pantai sangat berpengaruh terhadap bentuk dan jenis kebutuhan pembangunan infrastruktur pedesaan sehingga tersedia infrastruktur lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (*Human Investment*) didalam penyelenggaraan prasarana lokal.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan sejumlah negeri tetangga. Ketertinggalan dalam pembangunan

infrastruktur itu tak hanya terlihat dari tertundanya proyek-proyek besar, tapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, seretnya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum. Berbagai sub-sektor infrastruktur pasca-reformasi hingga saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Di sub-sektor irigasi hingga 2017, sekitar 1,5 juta hektare dari 6,7 juta hektar jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan dan berat dan pemerintah hanya mampu menyediakan 40-50% biaya operasi dan pemeliharaan (Bappenas, 2018). Selain itu, sekitar 15 ribu – 20 ribu hektare per tahun lahan pertanian beririgasi teknis beralih fungsi (konversi) menjadi lahan non-pertanian. Kerusakan jaringan irigasi akan menurunkan kinerja penyediaan air irigasi sehingga dapat menurunkan luas areal tanam padi, dan bila tidak diantisipasi secara serius akan mengganggu pemenuhan produksi beras nasional.

Kondisi serupa juga terjadi pada sub-sektor kelistrikan, rasio elektrifikasi masih rendah yaitu sekitar 58% pada tahun 2015. Di sisi lain, tidak adanya investasi baru di bidang perlistrikan (pembangkit baru) mengakibatkan 28 daerah di luar Jawa-Bali mengalami kritis listrik (Bappenas, 2018). Seperti kondisi infrastruktur lainnya, penyediaan air bersih pun masih menjadi kendala, saat ini terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air baku. Sistem dan jaringan prasarana dan sarana masih terbatas. 65 persen PDAM saat ini mempunyai utang sebesar 4,46 triliun rupiah . Sebanyak 187 PDAM beroperasi di tingkat kabupaten dan kota melayani sekitar 39% total penduduk dengan empat juta sambungan. Infrastruktur sebenarnya merupakan kebutuhan vital untuk menunjang kegiatan ekonomi.



Kemajuan ekonomi suatu negara biasanya berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur di negara itu. Negara yang infrastrukturnya baik biasanya makin makmur (Dewanto, 2017).

Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan alam melimpah dan menyimpan keanekaragaman sumber daya alam. Potensi sumber daya hutan, lahan sawah, perkebunan daerah, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat di wilayah ini. Dari tahun ketahun program pemerintah Provinsi NTB dalam penunjang potensi alam dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor infrastruktur sangat berkaitan erat dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 pasal 41 Tentang Jalan yang menyatakan bahwa suatu penanganan langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggaraan jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu penyelenggaraan jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum. Gangguan dan hambatan fungsi jalan antara lain, akibat kejadian alam seperti longsor, pembukaan jalan baru dan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah kota, kabupaten, desa maupun masyarakat juga mengikutsertakan dalam pemeliharaan dan pemerhatikan kondisi infrastruktur yang ada. Berdasarkan data jaringan jalan di Provinsi NTB dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami penurunan dan peningkatan, pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan pembangunan, perbaikan sekitar 0.51% pertahunnya,

sedangkan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan hingga 1,94%. peningkatan dan penurunan jaringan jalan di Provinsi NTB hanya terjadi pada jalan kabupaten maupun kota. (Profil dan Kinerja Perhubungan Darat Provinsi NTB Tahun 2019).

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Nusa Tenggara Barat termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh. Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita, wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami NTB defisiensi infrastruktur listrik. Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami defisiensi infrastruktur listrik pada tahun 2018. Maka dari itu kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi NTB adalah yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, peningkatan kapasitas suplai kelistrikan, peningkatan jaringan irigasi dan peningkatan kapasitas suplai air bersih.

Pembangunan partisipatif bertujuan agar bisa melihat apa yang harus dikembangkan atau di bangun di sebuah daerah berdasarkan potensi- potensi yang ada di desa tersebut. Sumber daya alam Indonesia memang melimpah namun tidak rata penyebarannya. Ada wilayah yang kaya dan juga ada wilayah yang miskin dengan kondisi alamnya. Secara geografis ada wilayah yang strategis karena menjadi jalur ekonomi nasional, bahkan internasional, ada pula wilayah yang terpencil bahkan terisolasi. Pembangunan sumber daya manusianya di Indonesia

juga tidak merata, ini juga menjadi kendala desa- desa sulit mengalami perkembangan karena tidak ada keinginan dan pengetahuan masyarakatnya untuk berubah kearah yang lebih baik. Dengan melihat potensi, masalah, dan tantangan itu, peran perencanaan pembangunan menjadi penting. Perencanaan pembangunan disusun dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini di arahkan untuk melihat tentang proses perencanaan pembangunan infrastruktur di desa dengan ruang yang diberikan oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang rumit dan membutuhkan sumber daya yang tinggi baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Apalagi di desa yang sumber dayanya kurang memadai perencanaan menjadi perhatian yang serius. Sejak diterbitkan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 desa mengalami perubahan paradigma pembangunan partisipatif, apalagi diberi dana desa yang jumlahnya tiap tahun meningkat. Oleh karenanya penelitian tentang perencanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan kondisi dan potensi desa ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa terkhususnya di bagian pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, air bersih, fasilitas perumahan, drainase dan irigasi dilaksanakan dengan kendala penyebaran Sumber Daya dan Sumber daya Manusia yang tidak merata penyebarannya di Indonesia.

Salah satu desa yang sedang maraknya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan salah satu program penting dalam perkembangan desa yakni terdapat di Desa Plampang. Desa Plampang merupakan

salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang memiliki banyak potensi dan isu permasalahan yang harus segera diatasi dalam segi penyediaan infrastruktur yang ada, karena jika dilihat dalam struktural kebijakan desa bahwa Desa Plampang merupakan ibu kota Kecamatan Plampang, maka dari itu sangat diperlukannya penyediaan infrastruktur yang memadai demi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2002, Kecamatan Plampang mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Plampang dan Kecamatan Labangka. Tahun 2004 terjadi kembali pemekaran menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge. Kecamatan Plampang terdiri dari 11 desa yang diklasifikasikan dalam 9 desa swakarya. Bertambahnya jumlah penduduk membutuhkan lahan untuk pembangunan. Seiring dengan hal itu, maka luas lahan setiap tahunnya akan mengalami pengurangan luas lahan. Karena lahan merupakan salah satu kebutuhan penduduk untuk keperluan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan perumahan serta kebutuhan fasilitas penunjang lainnya. Adapun jumlah penduduk di Desa Plampang yakni sebanyak 5.649 jiwa dengan luas wilayahnya 4.524,4 Ha..

Maka dari itu prioritas pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Plampang sangatlah lebih muda, akibatnya adanya pemekaran tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari kondisi eksisting saat ini masih banyaknya jalan yang rusak, baik rusak ringan maupun berat di sekitaran wilayah Desa Plampang. Pada tahun 2018 hingga sekarang belum adanya perbaikan, padahal jika dilihat dari struktur ruang RTRW Kabupaten Sumbawa bahwa Kecamatan Plampang merupakan pusat



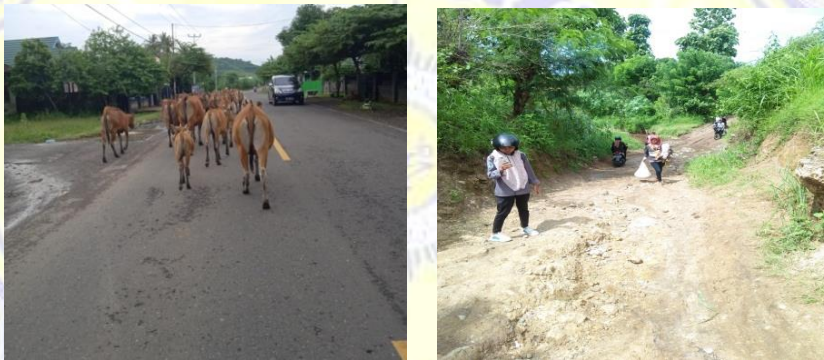
pelayanan kawasan perkotaan (PKK) yang berlokasi di Wilayah Desa Plampang yang berfungsi untuk melayani skala kecamatan atau beberapa desa atau kelurahan yang terdapat di Kecamatan Plampang. Jadi, semua fasilitas maupun infrastruktur pelayanan masyarakat berpusat pada desa ini. Seperti adanya ketersediaan sarana kesehatan, peribadatan, pemerintahan (Kantor Kecamatan Plampang, UPT Pertanian, Perikanan), sarana industri dan lain-lainnya. Jika dilihat dari Data APBD Desa Plampang, jumlah dana yang didapatkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.1 Milyar dengan luas wilayah hanya 4.524,4 Ha. Dapat dilihat dari data APBD Desa Plampang di tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Desa Plampang**

Jumlah Anggaran Belanja Dan Penerimaan Desa / Kelurahan Tahun Ini	Rp. 1.169.136.196,30
<b>Sumber Anggaran</b>	
APBD Kabupaten / Kota	Rp. -
Bantuan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp. 310.000.000,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp. -
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp. -
Pendapatan Asli Desa	Rp. -
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. -
Alokasi Dana Desa	Rp. 528.230.910,05
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa / kelurahan	Rp. -
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat	Rp.
Jumlah Belanja Publik / belanja pembangunan	Rp.
Jumlah Belanja Aparatur / pegawai	Rp. 221.172.000,00
Bagi hasil retribusi	Rp. 36.693.286,25

*Sumber Data : APBDesa Plampang.*

Dengan jumlah dana desa yang didapatkan tersebut seharusnya bisa membawa perubahan signifikan terhadap pembangunan desa. Dana desa itu digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi di Desa Plampang ini belum nampaknya terlihat perubahan mengenai pembangunan infrastruktur, banyaknya kondisi jalan lingkungan yang terlihat rusak baik rusak ringan maupun besar padahal kalau dilihat dalam Undang-undang Desa bahwa pembangunan infrastruktur jalan baik jalan arteri primer maupun arteri lokal harus dilaksanakan dengan baik dan tuntas demi keselamatan masyarakat. Berikut adalah gambar kondisi jalan di Desa Plampang.



**Gambar 1.1**  
**Kondisi jalan di Desa Plampang Tahun 2020**

Pada gambar 1.1 di atas terlihat jelas bahwa kondisi jalan di Desa Plampang banyak yang belum teraspal dan ketersediaan lampu penerangan jalan juga belum memadai padahal jika di lihat kembali bahwa jalan arteri primer yang terdapat di Desa Plampang merupakan jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Berdasarkan kondisi eksisting saat ini serta data profil desa pada tahun yang di mana panjang jalan rusak ini

tersebar di tiap-tiap lingkungan Desa 2019 panjang jalan rusak dan belum teraspal di Desa Plampang yakni berjumlah 2.764 m Plampang. Sedangkan dari ketiga dusun yang terdapat di Desa Plampang hanya terdapat 1 Dusun yang memiliki lampu penerangan jalan yang masing-masing berjarak 3 sampai 4 meter. Ketika peneliti masuk ke Desa Plampang ini mengamati berjalannya perencanaan pembangunan di sana ternyata begitu komplit permasalahan yang terjadi di desa ini terkait perencanaan pembangunan infrastruktur.

Ketersediaan air bersih pun masih sangat minim, terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air baku masih banyaknya masyarakat yang bermukiman di bagian timur Desa Plampang hampir seluruhnya belum menggunakan air PDAM. Dengan jumlah penduduk 5.649 jiwa dan jumlah KK sebanyak 1.201 yang tersambung jaringan PDAM yakni hanya sebanyak 565 kk maka sekitar 636 kk belum terpasang PDAM. Selain itu di Desa Plampang juga terdapat 969 Ha lahan sawah yang didominasi oleh 3 komoditas yakni padi gogo, padi sawah, dan jagung. Hasil Produksi Pertanian berdasarkan data dari BP3K Kecamatan Plampang bahwa dari 5 tahun ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berikut adalah tabel hasil produksi Pertanian di Desa Plampang dari tahun 2014 sampai 2018.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Produksi Sektor Pertanian di Desa Plampang**

No	Tahun	Padi Gogo (ton)	Padi Sawah (ton)	Jagung (ton)	Jumlah
1	2014	33,047	107,028	18,365	158,440
2	2015	33,481	111,143	28,272	174,911
3	2016	3,424	10,945	52,836	67,205
4	2017	4,303	11,335	63,173	78,811

5	2018	11,078	4,619	28,917	44,614
Jumlah		85,333	245,070	191,563	523,981

*Sumber: Kantor BP3K Kecamatan Plampang*

Berdasarkan hasil wawancara dan survey lapangan bahwa salah satu penyebab terjadinya penurunan hasil produksi pertanian di Desa Plampang irigasi untuk lahan sawah masih sangat terbatas sehingga banyaknya lahan sawah menjadi kering dan gersang serta banyaknya terdapat sampah di sekitar irigasi yang disebabkan belum adanya ketersediaan TPS di wilayah desa ini. Jika hal ini terus terjadi maka hasil yang didapatkan oleh masyarakat akan sangat terbatas sehingga masyarakat desa menjadi miskin dan kelaparan. Jika potensi di bidang pertanian ini pemerintah mampu mengembangkan maka hasil produk ini diperkirakan mampu mensejahterakan masyarakat dan dapat menembus pasaran nasional, karena jika di lihat di wilayah ini ada ketersediaan industri pengolahan padi dan jagung yang sangat besar yang mampu menampung hasil produksi masyarakat pertahunnya. Selain memiliki potensi pertanian di Desa Plampang juga mempunyai berbagai potensi yang luar biasa, yakni di bidang peternakan komoditas peternakan yang paling banyak yaitu ayam sebanyak 41,410 ekor dan sapi sebanyak 3,052 ekor. Dengan mengembangkan potensi- potensi yang ada tersebut seharusnya bisa memajukan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun karena masih adanya peranan segelintir elit dalam pembuatan perencanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa, menyebabkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak terlihat keberlanjutan pembangunannya. Karena masih adanya peran pemerintah dalam



menentukan siapa terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan. Sehingga menyebabkan perencanaan yang dilaksanakan tidak terlihat nilai tambahnya dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan.

Akan tetapi ada juga faktor lain yang dianggap mempengaruhi penghambat keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Plampang karena sejarah budaya kedatangan masyarakat ke Desa ini sebagai buruh dan keterbatasan pendidikan makna banyaknya staf desa yang hanya lulusan SMA sehingga lemahnya sumber daya manusia menyebabkan potensi- potensi desa tersebut belum terkelola dengan baik. Apalagi ditambah latar belakang pendidikan mereka yang rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan mereka kurang dalam memahami keberlanjutan dari sebuah pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain itu pengetahuan masyarakat akan hal itu juga sangat dibutuhkan akan tetapi pengetahuan masyarakat disini masih sangat minim dalam memahami konteks pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya, menurut Robert Chamber agar program yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, masyarakat harus dilibatkan mulai dari penentuan atau pemilihan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat yang dilibatkan akan merasa diberi kepercayaan sehingga akan muncul rasa tanggungjawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keberhasilan program akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat. Strategi dengan pendekatan dan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). PRA adalah sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa

untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi, potensi serta kehidupan desa membuat rencana dan bertindak atau dapat dikatakan “dari, dengan dan oleh” masyarakat desa.

Penelitian ini melihat bahwa dalam pengambilan keputusan masih ada peran segelintir elit dan factor keterbelakangan pendidikan serta karena kekurangan SDMnya sehingga belum mampu membuat perencanaan pembangunan secara matang terkhususnya di bagian infrastruktur Desa Plampang. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis bermaksud mengangkat judul tentang **“Perencanaan Pembangunan Infarstruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Infarstruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018 ?”.
2. Bagaimana Efektifitas Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) Dalam Perencanaan Pembangunan Infarstruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018 ?”.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektifitas Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

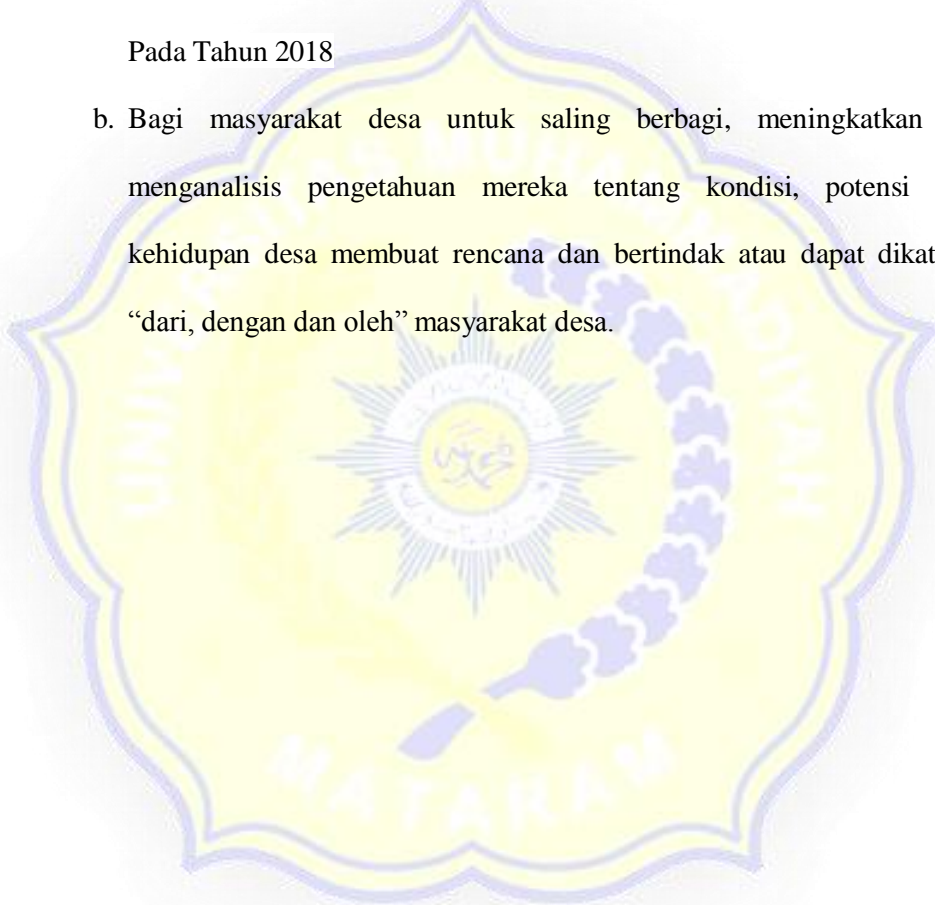
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu juga untuk pengembangan teori- teori yang membahas mengenai perencanaan pembangunan.

##### **2. Secara praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan untuk diharapkan dapat menjadi wawasan baru baik bagi mahasiswa tentang perencanaan pembangunan

infrastruktur desa, dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan perencanaan yang merupakan hal menarik untuk diteliti seperti:

- a. Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018
- b. Bagi masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi, potensi serta kehidupan desa membuat rencana dan bertindak atau dapat dikatakan “dari, dengan dan oleh” masyarakat desa.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya rancangan penelitian ini, sudah ada peneliti lain yang membahas mengenai perencanaan pembangunan terkhususnya pembanguana infrastruktur desa. Dari proposal penelitian ini peneliti mendapatkan beberapa kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yang pertama penelitian **Akmad Uwes Qoroni (2005)** dengan judul penelitiannya yaitu *“Efektifitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Di Kabupaten Tegal”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah di 4 (empat ) desa di Kabupaten Tegal . Metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan survey eksplanatori disajikan secara kualitatif diskriptif yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data yang non kuantitatif serta bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi serta potensi wilayah dan mendiskripsikan kenyataan yang ada. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perencanaan pembangunan daerah, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yakni infrastruktur, pedesaan efektifits dan potensi wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes sudah bisa dikatakan efektif karena perencanaan

infrastruktur pedesaan yang dihasilkan didasarkan pada orientasi terhadap lingkungannya (Kondisi wilayah) dan Optimalisasi sumber dayanya (Potensi wilayah), tetapi untuk realisasi tujuannya belum terpenuhi. Perencanaan Infrastruktur Pedesaan baik melalui analisis kondisi dan potensi wilayah maupun perencanaan partisipatif usulannya berbeda-beda sesuai dengan letak geografis wilayah tetapi mempunyai kesamaan bentuk perencanaan infrastrukturnya. Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, diharapkan perencanaan partisipatif melalui Musrenbangdes di Kabupaten Tegal dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Adapun kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu sama-sama meneliti tentang Efektifitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah. Akan tetapi dalam metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan survey eksplanatori yang dimana analisisnya berupa statistik atau angka, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, yaitu penelitian dari **Irma Purnama Sari (2009)**, yang berjudul ***“Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”***. Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk memberikan gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan

infrastruktur perdesaan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PPIP 2009. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan variabel yang terikat yakni pembangunan infrastruktur, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini program PPIP dan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan, manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan. Termasuk mulai memperhatikan program infrastruktur lingkungan di masyarakat (pengolahan limbah, perlindungan sumber air, dll). Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjabarkan data-data kondisi dan potensi infrastruktur desa, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu Tidak adanya saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Ketiga, penelitian **Elida Imro'atin Nur Laily (2015)**, yang berjudul ***“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif”***. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Sugio Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu perencanaan pembangunan, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Partisipasi

Perencanaan Partisipatif pada pembangunan perluasan Pasar di Desa Sugio dapat dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pedoman di daerah tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini, padahal masyarakat Desa Sugio pada umumnya telah mengerti dan memahami perencanaan partisipatif. Musrenbangdesa belum menjadi wadah yang handal bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pembangunan perluasan Pasar Desa. Selama ini musrenbangdes hanyalah sebagai formalitas saja, keputusan-keputusan tentang program pembangunan tetap berasal dari Pemerintah Daerah yang jarang sekali memperhatikan hasil Musrenbangdes itu sendiri. Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai efektifitas musrenbangdes perencanaan pembangunan desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu pada perencanaan infrastruktur.

Keempat, yaitu penelitian dari **Murba (2017)** tentang ***“Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”***. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka



melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu program pembangunan, sedangkan variabel bebas yaitu perencanaan infrastruktur.

Dengan kesimpulan dari penelitiannya yaitu Implementasi pembangunan di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa dibilang tidak optimal, itu dapat dilihat dari tidak terimplementasinya dengan baik beberapa infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam bidang, jalan, listrik dan jaringan yang dianggap sangat meresahkan masyarakat padahal anggaran desa harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat meskipun transparansi masih belum dilakukan pemerintah setempat. Serta aktor utama yang menghambat implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong adalah faktor anggaran, tata kelola anggaran yang tidak sesuai rencana sehingga secara aplikatif pembangunan infrastruktur kurang lancar dan berujung pada tidak efektifnya hasil yang dicapai. Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa yang dilihat dari RPJMDes dan APBD. Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana program pembangunan diimplementasikan di Desa Erecinnong, dengan melihat bagaimana proses-proses implementasinya serta bagaimana faktor yang menghambat implementasi pembangunan tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih detail menjelaskan tentang bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur

pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi desa dan bagaimana efektifitas musrembangdesa di Desa Plampang ada tahun 2018.

Yang kelima yaitu penelitian dari **Annisa Rusyda (2019)** tentang ***“Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sikalang Kota Sawahlunto Tahun 2018”***. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjekaskan bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Sikalang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan teori Robert Chambers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu perencanaan pembangunan pedesaan.

Penelitian ini menemukan proses perencanaan pembangunan bahwa pendekatan PRA tersebut berjalan sesuai kebijakan tetapi pada proses pengambilan keputusan itu sangat elitis atau dalam proses pengambilan keputusan dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas. Itulah yang menyebabkan efektifitasnya tidak terlihat karena adanya mobilisasi partisipatif tersebut. Partisipatifnya itu tidak terbuka, karena adanya peranan elit politik atau pemerintahan desanya mempersepsikan sendiri terhadap siapa yang boleh dikutsertakan dalam proses perencanaan sehingga kurang demokrasi. Efeknya gagasan yang diluar aturan tidak terakomodasi di dalam proses perencanaan pembangunan, hasilnya memang sesuai dengan aturan kebijakan tersebut tetapi tidak memberi nilai tambah terhadap

pembangunan berkelanjutan atau terhadap usaha- usaha yang lebih produktif di Desa Sikalang. Relevansi dalam penelitian ini yaitu Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjabarkan data-data kondisi dan potensi infrastruktur desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hanya memberikan gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe,2005:27)

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Definisi lain menurut para ahli perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternative yang ada (Hasibuan, 2015). Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (Listyansih,2014:90) Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan terdapat hal-hal pokok yaitu: 1) Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta, 2) Adanya alternative-alternatif atau pilihanpilihan sebagai dasar penentuan, 3) Adanya tujuan yang ingin dicapai, 4) Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan, 5) Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Listyansih,2014:90), selain itu pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan



pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Berdasarkan definisi-definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

Dari definisi perencanaan pembangunan di atas kita dapat melihat gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan, pembangunan dan proses yang ada di dalamnya, dalam hubungannya dengan daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan, pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas.

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan meliputi perencanaan komunitas menyangkut suatu area/wilayah (daerah) dan pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. tetapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki tidak



memungkinkan pembangunan langsung menyentuh dan mengatasi seluruh permasalahan pembangunan serta tuntutan secara sekaligus. Dalam hal ini penentuan prioritas perlu dilakukan, di dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. Dan pasal 81 ayat 1 juga menyebutkan bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan

Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Model pembangunan perdesaan bisa disebut dengan suatu model pembangunan dari bawah (bottom-up) atau pembangunan yang didasarkan atas proses belajar dari bawah. Model ini memang memerlukan waktu yang panjang dan tenaga yang banyak, tetapi bisa dianggap sebagai model yang ramah bagi masyarakat miskin perdesaan, karena strateginya didapatkan dari kehidupan masyarakat perdesaan. Jika dibandingkan dengan model pembangunan perdesaan yang (top-down), yang dirancang dari atas, memang lebih efektif, tetapi banyak kasus mengalami kegagalan. Mudah-mudahan model belajar dari bawah (bottom-up) yang digagas oleh Robert Chambers ini ada manfaatnya, terutama bagi pembangunan desa di Negara Dunia Ketiga, meskipun ide atau pemikiran itu telah lama dikemukakan.

Masyarakat lokal yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhannya, merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunannya secara mandiri dan swadaya. Dengan kata lain pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, yang lebih populer dengan

sebutan pemberdayaan masyarakat (people empowerment) (L. Hayat Satar, 2012 :13).

Agar program yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, masyarakat harus dilibatkan mulai dari penentuan atau pemilihan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat yang dilibatkan akan merasa diberi kepercayaan sehingga akan muncul rasa tanggungjawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keberhasilan program akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat. Strategi dengan pendekatan dan metode yang saat ini dikembangkan adalah metode PRA (Participatory Rural Appraisal). PRA adalah sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagai, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa membuat rencana dan bertindak atau dapat diaktakan “dari, dengan dan oleh” masyarakat desa. Secara lebih luas PRA meliputi analisis, perencanaan dan tindakan. Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam PRA adalah :

- a. Pemberian fasilitas, artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penjadjian dan pemahaman oleh masyarakat desa, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya, dan juga mempelajarinya.
- b. Kesadaran dan tanggungjawab diri yang kritis, artinya fasilitator secara terus menerus menguji tingkah laku mereka dan mencoba melakukannya secara lebih baik.

- c. Saling berbagai informasi dan gagasan antara masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator yang berbeda serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda.

Dalam PRA masyarakat desa sendiri yang lebih memiliki informasi dan saling berbagi informasi tersebut. Perilaku dan sikap orang luar yang datang menjadi fasilitator sangatlah rawan, harus rileks dan tidak boleh tergesa-gesa, mampu menunjukkan rasa hormat dan berperan sebagai fasilitator dan memiliki kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri. Cara-cara penyelidikan, proses saling berbagai dan analisis dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh kelompok serta melalui perbandingan-pembandingan.

### **2.2.2 Pembangunan Desa**

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo



dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

### **2.2.3 Desa**

Dalam arti umum desa adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian agraris, desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administrative yang disebut juga kelurahan, dan lurah disebut sebagai kepala desa, dengan demikian di dalam kota-kota pun dikenal sebutan desa. Adapun desa yang tersebar di luar kota dengan lingkungan fisisbiotisnya adalah gabungan dukuh, dukuh sendiri dapat mewujudkan suatu unit geografis karena tersebar seperti pulau di tengah persawahan atau hutan. Kesatuan administrative Desa, sebutan di luar jawa dapat beraneka: gampong (Aceh), huta (Tapanuli), nagari (Sumatera Barat), marga (Sumatera Selatan), wanus (sulawesi Utara) dan dusun dati (Maluku).

Menurut Indrizal (2016) menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai : “suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas keil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian menurut” Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan: “Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh



seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.

Definisi lain mengenai desa berangkat dari desa sebagai permukiman yaitu suatu tempat atau daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama di mana mereka dapat menggunakan lingkungannya setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka (Daldjoeni,2011), dalam definisi tersebut tersirat adanya tiga unsur yaitu penduduk, tanah dan bangunan. Karena masing-masing unsur itu cepat atau lambat mengalami perubahan maka desa sebagai pola permukiman bersifat dinamis, hal tersebut diakibatkan karena manusia sebagai penghuni desa selalu melakukan adaptasi spasial dan ekologis sejalan dengan kegiatannya yang bermatapencaharian agraris.

#### **2.2.4 Unsur-unsur Desa**

Desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki tiga hal yaitu wilayah (rangkah), satu keturunan (darah), dan ajaran atau adat (warah) (Rusmiwari;2016)), hingga kini tiga unsur yang berkembang di desa-desa Jawa adalah daerah, penduduk dan tata kehidupan.

- a. Daerah Daerah adalah tanah-tanah pekarangan dan pertanian beserta penggunaannya, termasuk pola aspek lokasi, luas, batas, yang kesemuanya itu merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. Penduduk Jumlah penduduk, penambahan, kepadatan, penyebaran serta mata pencahariannya..

- c. Tata kehidupan Ajaran tentang tata hidup, tata pergaulan dan ikatan-ikatan sebagai wara masyarakat desa, dengan sendirinya tata kehidupan itu tak dapat dilepaskan dari seluk beluk usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kesimpulannya bahwa setiap desa memiliki *geographical setting* dan *human effort*-nya masing-masing yang berbeda-beda. Ada desa bersumber daya menguntungkan tetapi semangat membangun, ketrampilan dan pengetahuan masyarakatnya seba kurang, sehingga desa tersebut tak dapat maju. Sebaliknya ada desa yang meski sumber dayanya serba terbatas, tetapi dapat maju ekonomisnya, berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam lain, dipengaruhi oleh unsur-unsur geografis wilayah yang ditempati, sehubungan hal tersebut ada empat unsur geografis yang ikut menentukan persebaran/perkembangan desa yaitu lokasi, iklim, tanah dan air.

## **2.2.5 Infrastruktur Pedesaan**

### **2.2.5.1 Infrastruktur**

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *publik capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2013).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat Infrastruktur merupakan barang barang publik yang bersifat non eksklusif (tidak ada orang yang dapat dikesampingkan), non rival (konsumsi seorang individu tidak mengurangi konsumsi individu lainnya) serta umumnya biaya produksi marginal adalah nol. Infrastruktur umumnya juga tidak dapat diperjualbelikan (non tradable) (Henner, 2010). Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran langsung atas penggunaan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Dengan memberikan dukungan kepada fasilitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi (Canning dan Pedroni, 2014). Eksternalitas positif 21 dalam infrastruktur berupa peningkatan produksi perusahaan-perusahaan dan sektor pertanian tanpa harus meningkatkan modal input dan tenaga kerja/juga meningkatkan level teknologi.

#### **2.2.5.2 Infrastruktur Pedesaan**

Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di pedesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga yang dapat dinyatakan dapat memenuhi persyaratan untuk hidup. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air

minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum (Daldjoeni, 2011). Dari kedua kebutuhan tersebut harus berjalan bersama-sama tetapi diprioritaskan adalah penyediaan kebutuhan sarana prasarana sebagai dasar pemenuhan kebutuhan hidup yang lain.

Dalam pembangunan pedesaan haruslah merupakan inner will, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo, 2013) Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, adalah meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan social ekonomi serta membangun prasarananya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) adalah: alam, manusia, letak desa, mata pencaharian, produksi, adat, kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan administrasi.

Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (human investment) didalam penyelenggaraan prasarana lokal. Belum ada ketentuan mengenai jenis

prasarana/sarana pedesaan yang menjadi dasar usulan kegiatan dalam Musrenbangdes, infrastruktur tersebut dapat berupa jalan poros desa, jalan desa/lingkungan/setapak, jalan usaha tani/inspeksi, jembatan gantung, prasarana air bersih, pasar tradisional, balai desa, lumbung desa, posyandu, sekolah dasar, tambatan perahu, dermaga, tempat penjemuran jala/ikan, sarana sanitasi dasar, pangkalan angkutan, pintu bagi air, pintu air, saluran tersier, talang, bendung kecil atau tanggul (Kimpraswil,2011).

Dari keterangan tersebut diatas dapat dikategorikan ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu:

**a. Jalan Desa**

Jaringan jalan yang ada desa adalah sebagai berikut:

- Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blokblok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten).
- Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan satu dengan lingkungan (sub-blok) lainnya dalm suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan makadam.
- Jalan lingkungan adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya menghubungkan antar satuan pemukiman atau jalan masuk ke



masingmasing lingkungan kecil yang ada di wilayah perencanaan. Jalan ini sebagian sudah diperkeras tetapi masih banyak berupa jalan tanah.

#### **b. Air Bersih**

Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawasan dengan ketentuan dan keuntungan antara lain:

- Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu (12 jam atau 24 jam).
- Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil.
- Sistem sambungan pada langganan menggunakan pembatas aliran (*restrictor*).
- Pembayaran air langganan setiap bulan dengan jumlah tetap.
- Sistem operasional secara sederhana dan murah.
- Kebutuhan akan tenaga tidak besar.
- Dengan kriteria tersebut pembangunan jaringan air bersih di pedesaan dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau.

#### **c. Listrik**

Kriteria perencanaan diarahkan berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain:

- Dipenuhinya ketentuan yang ada di dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan ketentuan perundangan yang berlaku serta mengikat dalam perencanaan jaringan listrik, termasuk didalamnya petunjuk

pengajuan rencana instalasi listrik dan perlengkapan bangunan. Pembidangan perencanaan instalasi listrik dan syarat-syarat penyambungan listrik tahun 2004.

- Jaringan listrik/trafo yang telah diinterjesing, kapasitas/daya yang dapat dan telah dioperasikan.
- Skala prioritas pengadaan jaringan sesuai dengan urgensi pengembangan jaringan listrik, dalam kaitannya dengan radius pelayanan dan kemungkinan dikembangkan atau ditingkatkan.
- Untuk rumah tinggal/permukiman, daya listrik yang didistribusikan dalam batas tertentu, minimal untuk keperluan penerangan, termasuk didalamnya kebutuhan penerangan lingkungan dan jalan.
- Rumusan teknis untuk pengembangan dan peningkatan disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- Jarak jaringan listrik yang masuk ke bagian wilayah perencanaan, termasuk didalamnya jarak antar tiang sekitar 50 m dan jarak kawat penghantar (konduktor) yang dipertimbangkan terhadap unsur-unsur pada lingkungan, seperti bangunan, pohon, jarak tiang harus sesuai dengan aturan PLN yang berlaku
- Penerangan untuk permukiman diarahkan sebagai berikut:
  - Tiap satu unit rumah tinggal minimal disediakan daya sebesar 450 VA (watt) dengan perhitungan 1 KK terdiri atas 5 jiwa.

- Besarnya daya setiap luas ruang, disesuaikan dengan kebutuhan dan diharapkan dapat memenuhi fungsi yang direncanakan.
- Setiap tipe unit permukiman, batas penggunaan daya listriknya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur oleh PLN.
- Kebutuhan listrik untuk penerangan jalan disesuaikan dengan model/pola pengembangan lingkungan.
- Jumlah dan sebaran tiang-tiang listrik untuk penerangan jalan diatur sesuai dengan urgensi/ketentuan penataannya.
- Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan social ekonomi meningkat, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi meningkat. Sebagai salah satu konsep pola pikir, dibawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur, diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai objek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi.

## **2.2.6 Partisipasi Masyarakat**

### **2.2.6.1. Pengertian Partisipasi**

Terdapat beberapa pengertian dasar mengenai proses partisipasi masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara A adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, yaitu:
- Dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
  - Dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela.
  - Dalam pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek (sesuai dengan azas pembangunan yaitu pembagian yang merata atas hasil pembangunan).
- b. Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

### 2.2.6.2.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan tergantung pada sikap warga dan efektivitas organisasi masyarakat (Schubeler, 2011). Di samping itu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan serta mata pencaharian (Slamet, 2013).

#### a. Jenis Kelamin.

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita akan berbeda dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Meskipun dewasa ini kesetaraan antara pria dan wanita sudah mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetapi di perdesaan hal ini belum bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam partisipasi (Soedarno, 2002).

#### b. Usia.

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar



senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno, 2002). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

c. Tingkat pendidikan

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dan peran serta. Salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha peran serta yang diberikan masyarakat dalam pembangunan (Litwin, 2006). Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya tentu mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan.

d. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, penduduk yang lebih kaya biasanya membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan paspasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

Dalam proyek-proyek pembangunan penduduk yang lebih berada kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kegiatan fisik sendiri. Sementara penduduk miskin melakukan banyak pekerjaan namun tidak memberi kontribusi uang. Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Suparlan, 2010).

e. Mata Pencaharian

Mata pencaharian akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti, diskusi dan lain sebagainya. Faktor jenis mata pencaharian/pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. (Slamet, 2009).

### **2.2.6.3. Tipe Peran Serta Masyarakat**

Ada beberapa tipe-tipe peran serta masyarakat yang ada dimasyarakat terutama sekali untuk menggolongkan kesediaan masyarakat didalam pembangunan pada pemerintah yang demokratis. Karena peran serta tidak dapat terwujud dengan sebenar-benarnya tanpa adanya dukungan pemerintah sebegitu juga sebaliknya tanpa ada dukungan rakyat, pemerintah demokrasi didalam

pembangunan partisipatif tidak dapat terwujud. Beberapa tipe peran serta masyarakat menurut Duseldorp (Slamet, 2003) mengklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tipe berdasarkan derajat kesukarelaan Berdasarkan bentuk derajat kesukarelaan, tipe ini mempunyai dua bentuk:
  - a. Bentuk bebas: bentuk peran serta bebas ini terjadi apabila seseorang melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan partisipatif dilakukannya dengan ketulusan dan keiklasan (secara sukarela). Pada peran serta ini dapat dilakukan secara spontan ini seseorang melakukannya berdasarkan keyakinan dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain baik melalui ajakan ataupun penyuluhan maupun desakan lembaga lain. Sedangkan peran serta yang dilakukan karena terbujuk adalah karena seseorang individu mulai berperan setelah diyakinkan melalui program penyuluhan ataupun pengaruh dari pihak lain.
  - b. Bentuk terpaksa: bentuk peran serta ini terjadi karena terpaksa baik oleh hukum maupun oleh karena keadaan sosial ekonomi. Kegiatan peran serta terpaksa ini dilakukan karena adanya peraturan perundangan yang memaksanya dalam suatu kegiatan.
2. Tipe berdasarkan pada cara keterlibatan Pada tipe ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
  - a. Peran serta secara langsung: terjadi apabila seseorang menampilkan kegiatan tertentu didalam proses peran serta, misalnya:

menyumbangkan tenaga, diskusi, mengambil peran dalam pertemuan dan lain-lain.

b. Peran serta tidak langsung: apabila seseorang menyerahkan haknya kepada orang lain untuk mewakilinya didalam suatu kegiatan partisipasi misalnya pengambilan keputusan pada dewan/senat, DPR, MPR dewan-dewan koperasi dan lain sebagainya.

3. Tipe berdasarkan keterlibatan dalam berbagai tahap pada proses pembangunan Di dalam tipe terdapat beberapa langkah perwujudannya 6 (enam) langkah yaitu: perumusan persetujuan, penelitian, persiapan rencana, penerimaan rencana, pelaksanaan dan evaluasi. Peran serta pada tipe ini disebut peran serta lengkap dimana seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat secara penuh didalam proses tersebut. Sedangkan dikatakan peran serta sebagian, bila dikatakan keterlibatan seseorang secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat secara langsung proses tahapan tersebut.
4. Tipe berdasarkan pada tingkatan organisasi Tipe ini berdasarkan peran serta yang terorganisasi dan yang tidak terorganisasi. Peran serta yang terorganisasi dapat dilihat dari strukturnya dan mempunyai seperangkat tata kerja yang dilaksanakan maupun dalam proses persiapannya. Sedangkan peran serta yang tidak terorganisasi lebih tercermin pada kegiatan temporer saja, tetapi akan menjadi peran serta yang terorganisir apabila kegiatannya berulang-ulang sehingga diperlukan adanya pengorganisasian.

#### **2.2.6.4. Bentuk dan Wujud Peran Serta dalam Pembangunan**

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 2009). Pada umumnya keterbatasan masyarakat adalah mengembangkan dan melatih kemampuan mereka dan mengekspresikan kebutuhan, pemikiran dan perasaannya (Young, 2002). Untuk merubah keadaan, keterbatasan tersebut dapat diwadahi melalui perencanaan (Hibbard and Lane, 2005).

Bentuk peran serta masyarakat sebenarnya sudah terbentuk sejak berjalan suatu proses, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi dari suatu pembangunan dan kemudian dilanjutkan lagi sampai pada pemeliharaan untuk tetap berkelanjutan sehingga pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat tidak akan berhenti hanya pada titik pemanfaatan saja tetapi berputar terus tanpa ujung.

#### **2.2.7. Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

##### **2.2.7.1. Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG)**

Merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kali memiliki Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, karena selama ini perencanaan pembangunan di daerah diatur di tingkat Menteri misalnya Kepmendagri Nomor 9 Tahun 2002 tentang



Pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah (P5D).

Selain Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya dari ke 3 Undang-undang tersebut mengatur tentang perencanaan pembangunan. Hal yang sangat mendasar dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa proses pembangunan di daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional. Oleh karena itu baik mekanisme, penganggaran dan substansinya harus mencerminkan keterkaitan antara pusat dan daerah. Dasar Pelaksanaan Musrenbang adalah Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negari Nomor 0259/M.PPN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.

Pengertian musrenbang adalah forum di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Proses Musrenbang memajukan setiap daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat (Kimpraswil,2009:2).

Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat dari tingkat Desa, Kecamatan, SKPD dan Kabupaten.

**a. Tujuan.**

- 1) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya.
- 2) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.
- 3) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

**b. Keluaran.**

- 1) Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan
- 2) Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
- 3) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Propinsi.
- 4) Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

### **c. Peserta**

Komponen Masyarakat (Individu/Kelompok) yang berada di desa/Kelurahan seperti: Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Adat, Kelompok perempuan, Kelompok Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

#### **2.2.7.2. Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Kegiatan perencanaan tingkat daerah harus diarahkan berdasarkan isu yang dianggap relevan bagi pembangunan. Dimulai dengan perumusan visi dan tujuan umum pembangunan jangka panjang berdasarkan masukan dari kelompok stakeholder terkait, sehingga visi misi menjadi milik bersama dan acuan untuk semua pelaku pembangunan di daerah. Pemahaman terhadap proses perencanaan partisipasi penting untuk mendorong pemerintahan daerah agar memiliki kesepahaman tentang mekanisme dan formulasi proses Musrenbang. Meskipun “Event Musrenbang” bukan merupakan barang baru bagi semua pihak di tingkat Kabupaten, namun kenyataannya menunjukkan bahwa sampai saat ini hanya 1 – 5 % saja usulan dari bawah (hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan) yang tertuang dan diakomodir dalam APBD. Untuk itu penyegaran tentang

Proses Musrenbang partisipatif yang efektif perlu dilaksanakan sebelum pra-Musrenbang dimulai. Sehingga ada kesamaan pandangan dan kebutuhan serta konsisten terhadap suatu proses partisipasi yang nyata. Dasar dari ketegangan ini adalah antara prakarsa dan kepercayaan yang terjadi diatas 2

(dua) konflik kerangka pikir dalam pelaksanaannya, yang melekat dalam struktur organisasi dan proses perencanaan yang melingkupinya. Di salah satu sisinya sebagai ideologi dari hubungan tindakan dan demokrasi lokal yang dilakukan oleh pergerakan "grass root" dan tindakan suka rela, disisi lainnya sebuah kesetiaan pada perencanaan yang rasional, dan essensinya dilakukan oleh pendekatan birokrasi di dunia pemerintahan, philantropi dan keahlian (Chaskin, 2005).

### **2.2.7.3. Dasar Hukum Musrenbang**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 128 ayat (2) Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Mei.

### **2.2.7.4. Perlibatan Masyarakat atau Peserta dalam Musrenbang**

Musrenbang dari awal dibentuk dengan harapan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat agar pendapat dan usulan masyarakat terhadap perencanaan program-program pembangunan yang ada di daerahnya dapat difasilitasi didukung dan diakomodir oleh pemerintah daerah beserta masyarakat itu sendiri dan komponen yang lain. Dalam Musrenbang Desa, Kepala Desa dan unsur-unsur Desa lainnya sebagai pihak penyelenggaraan Musrenbang

memberikan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang yang ada di Desa/Kelurahan tersebut. Kemudian juga di level kecamatan, camat beserta unsur-unsur aparat kecamatan sebagai pihak penyelenggara memberikan/menyebarkan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang Kecamatan.

#### **2.2.7.5. Peran dan Kedudukan Musrenbang**

Musrenbang merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya tahap persiapan penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. Musrenbang bertujuan untuk menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan daerah, serta mekanisme penanganannya.

Musrenbang merupakan wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan “*top-down*” dengan “*bottom-up*”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis serta resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Musrenbang disebut



juga Musrenbang Daerah, untuk Kabupaten/Kota disebut juga Musrenbang Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi disebut juga Musrenbang Provinsi. Musrenbang Kabupaten/Kota merupakan puncak kegiatan musyawarah pembangunan yang diawali dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD, sedangkan Musrenbang Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota diwilayahnya.

## **2.2.8. Efektivitas Perencanaan**

### **2.2.8.1. Pengertian Efektivitas**

Di dalam berbagai bidang keahlian, pengertian efektivitas sangat beragam dan tergantung kepada konteks yang bagaimana efektivitas tersebut digunakan. Tetapi pada umumnya para ahli sependapat bahwa pengertian efektivitas pada prinsipnya adalah seberapa besar hasil guna yang dicapai dengan mempergunakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia.

Menurut Barnard (Gypson, 2006), efektivitas adalah mempunyai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat keefektivan yang dicapai. Sedangkan menurut (Drucker, 2004) bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran (out-put) yang diharapkan. Jadi efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula.

Kalau dilihat dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut di atas, maka pengertian efektivitas dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan akan dikatakan efektif apabila sumber daya yang digunakan (sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya), dapat seimbang dengan hasil dan manfaat yang dihasilkan. Jadi sasaran yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (input sama dengan output) atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan dengan mempergunakan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila sumber daya yang digunakan (sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya), dapat seimbang dengan hasil dan manfaat yang dihasilkan. Jadi sasaran yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (input sama dengan output) atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan.

#### **2.2.8.2. Tingkat Efektivitas Perencanaan**

Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu kelompok, perlu adanya pengukuran dan menurut (Etzioni,2008). Indikator-indikator pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

- Orientasi terhadap lingkungan
- Alokasi sumber daya secara optimum
- Realisasi tujuan

Lebih lanjut dijelaskan (Argyris, 2008) yang menjadi indikator tingkat efektivitas kelompok/organisasi adalah:

- Adaptasi terhadap lingkungan luar kelompok
- Pengawasan intern kelompok
- Pencapaian tujuan

Jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan dan peluang serta haknya, untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan berlangsung efektif dan efisien, jadi tujuan dari pembangunan itu dapat benar-benar tercapai misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana akan lebih baik.

Partisipasi masyarakat yang demikian akan membangkitkan semangat kemandirian dan kerjasama antara masyarakat. Masyarakat sendiri akan berusaha meningkatkan partisipasinya, swadayanya, yang pada akhirnya akan mengurangi beban kebutuhan sumber daya pemerintah. Disisi lain segi efektivitas dan efisiensi peran serta masyarakat perlu juga diwaspadai, dimana peran serta masyarakat jangan hanya tercipta pandangan dari sumbangan sumber daya yang bersifat nyata dan terukur (uang, tanah dan tenaga). Akan tetapi, peran serta masyarakat bisa juga terlihat dari sumbangan sumber daya yang tidak terlihat/tidak tampak yaitu pengetahuan (sumber daya, kebutuhan, prioritas dan daerah masyarakat tersebut), kreativitas, ketrampilan dan organisasi.

Jadi dengan demikian, agar masyarakat diberi kesempatan untuk menyumbangkan sumber daya yang ada didalam masyarakat baik yang tampak

maupun yang tidak nampak agar mereka tidak kehilangan motivasi, kemauan dan kreativitas serta keantusiasan mereka didalam mewujudkan peran sertanya.

### **2.2.8.3.Efektivitas Musrenbangdes dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah.**

Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah seperti diutarakan oleh (Kodoatie, 2003), bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg,2000).

Dengan demikian perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes harus berorientasi terhadap lingkungan (kondisi wilayah) dan

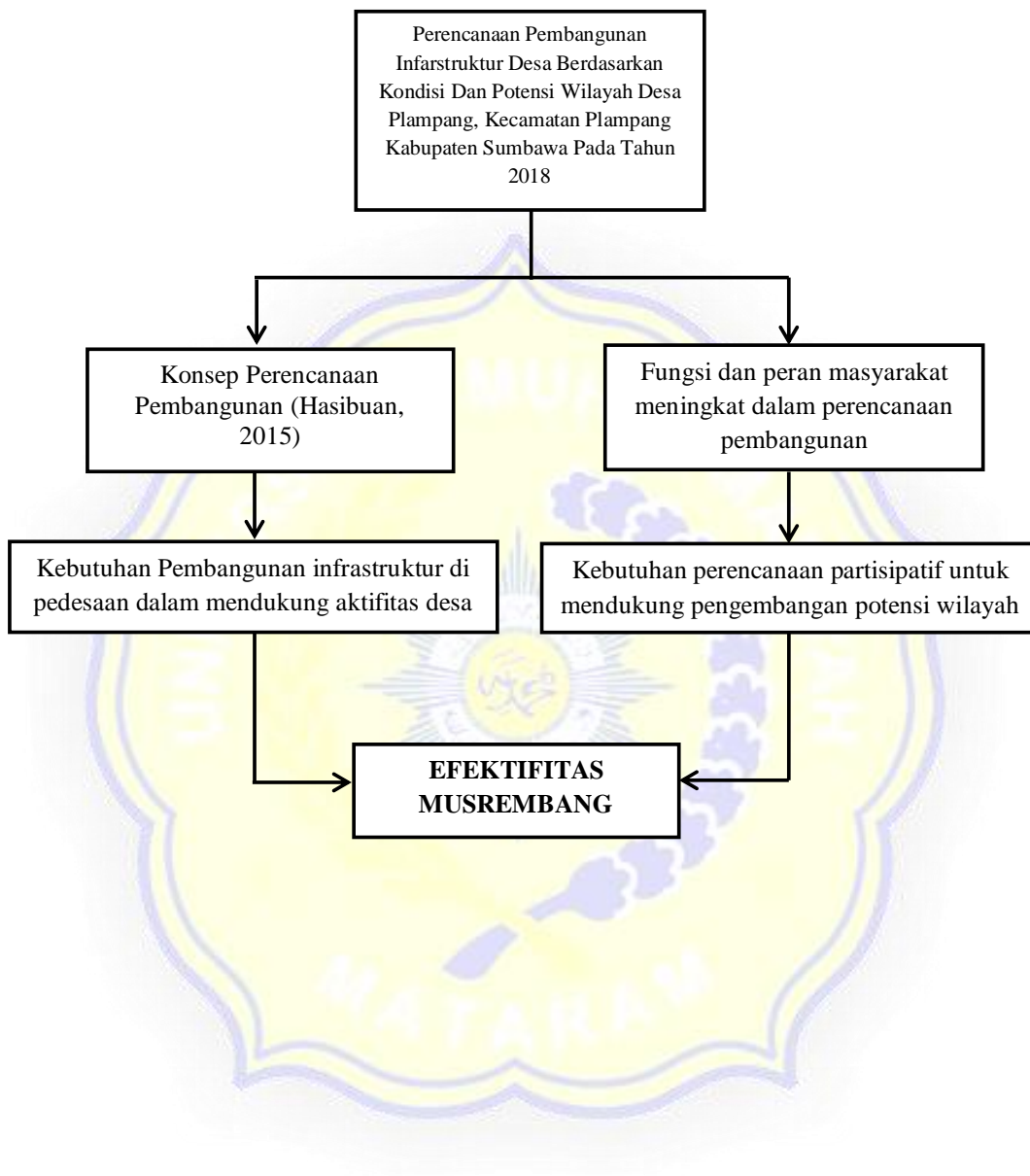
mengoptimalkan sumber daya yang ada (potensi wilayah). Dalam pelaksanaannya perencanaan infrastruktur pedesaan harus memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas (Bratakusumah,2004).

Dengan demikian Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya (Jensen,2005).

Menurut Barnard (Gypson, 2006), efektivitas adalah mempunyai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat keefektivan yang dicapai. Sedangkan menurut (Drucker, 2004) bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran (out-put) yang diharapkan. Jadi efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula. Maka untuk menentukan tingkat tingkat efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan, didasarkan pada indikator-indikator efektivitas yang ada yaitu: 1) Berorientasi terhadap lingkungan, 2) Optimalisasi sumber daya, 3) Realisasi Tujuan yang hendak dicapai.



### 2.3 Skema Pemikiran dalam Penelitian



## 2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasaan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini yang berjudul **“Perencanaan Pembangunan Infarstruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018”**, antara lain :

### 1. Konsep Perencanaan

Kartasasmita (2007), Pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Menurut Kartasasmita ada 5 variabel yang berperan penting dalam konsep perencanaan.

## **2. Infrastruktur Desa**

Menurut Grigg (2007), ada beberapa variabel yang terdapat dari infrastruktur yaitu merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi.

## **3. Partisipatif**

Menurut Slamet, (2004) Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal. Ada 5 variabel yang terdapat partisipasi masyarakat yakni jenis kelamin, usia, pendapatan, tingkat pendidikan dan mata pencaharian.

## **4. MUSREMBANG**

Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah seperti diutarakan oleh (Kodoatie, 2003). Ada terdapat 3 variabel dalam efelktifitas Musrembang yakni : 1) Berorientasi terhadap lingkungan, 2) Optimalisasi sumber daya, 3) Realisasi Tujuan yang hendak dicapai.

## 2.5 Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akandapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti, dapat dilihat melauai tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Defenisi Operasional**

No	Variabel	Sub Variabel	Keterangan
1	<b>Konsep Perencanaan</b>	Asumsi-Asumsi Yang Didasarkan Pada Fakta-Fakta	Identifikasi isu-isu strategis perencanaan
		Alternative-alternatif atau pilihanpilihan sebagai dasar penentuan.	Penelitian Terdahulu
		Memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.	Potensi dan Masalah Desa
		kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.	RPJMD dan RPJP Desa Plampang
2	<b>Infrastruktur Desa</b>	Transportasi Desa	Terminal
		Pengairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Irigasi</li> <li>• Air Bersih</li> </ul>

		Drainase	Drainase terbuka dan tertutup
		Fasilitas Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan Listrik</li> <li>• Sarana Peribadatan</li> <li>• Sarana Pemerintahan</li> <li>• Sarana Kesehatan</li> <li>• Sarana Pendidikan</li> </ul>
3	Partisipatif	Jenis Kelamin	Jumlah Keikutsertaan Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin Pria dan Wanita
		Usia	-
		Tingkat Pendidikan	-
		Mata Pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani</li> <li>• PNS</li> <li>• Wiraswasta</li> <li>• Nelayan</li> </ul>
4	MUSREMBANG	Berorientasi terhadap lingkungan,	Tindakan
		Optimalisasi sumber daya,	Evaluasi
		Realisasi Tujuan yang hendak dicapai.	Hasil



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

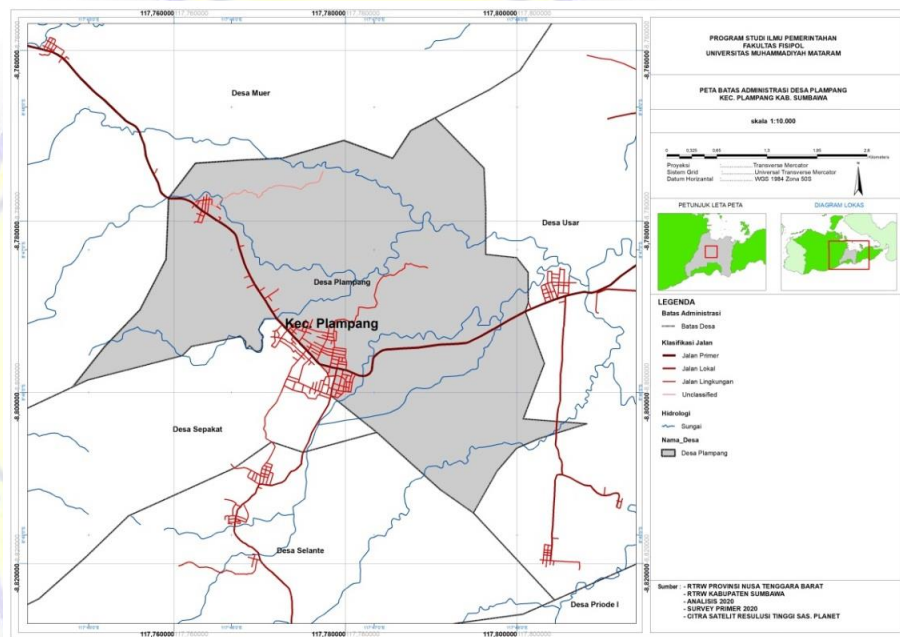
Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada masalah yang ada, pada penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana Perencanaan Pembangunan infrastruktur dan Efektifitas Musrebangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2018.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Desa Plampang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang memiliki banyak potensi dan isu permasalahan yang harus segera diatasi dalam segi penyediaan

infrastruktur yang ada, karena jika dilihat dalam struktural kebijakan desa bahwa Desa Plampang merupakan ibu kota Kecamatan Plampang, maka dari itu sangat diperlukannya penyediaan infrastruktur yang memadai demi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di Desa Plampang yakni sebanyak 5.649 jiwa dengan luas wilayahnya 4.524,4 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar peta dibawah ini.



**Gambar 3.1 Peta Batas Administrasi Desa Plampang**

### 3.3 Informan Penelitian

Menurut Hamid Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam teknik pemilihan informan ini menyusun teknik pengumpulan data primer dengan teknik observasi, wawancara terstruktur. Dalam menentukan informan, adapun metode yang digunakan yakni teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Melalui wawancara terstruktur ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden terpilih berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dilengkapi dengan observasi dan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, yaitu :

- 1) Informan kunci adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, yakni:
  - a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa (PPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa.
  - b. Kepala Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.
- 2) Informan utama merupakan orang yang terlihat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
  - a. Kepala Badan Pembangunan Desa (BPD) Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
- 3) Informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial dan orang

yang terlibat langsung dalam Musrembangdes Plampang Tahun 2018, yaitu:

- a. Kepala Dusun Karya Jaya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
- b. Kepala Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
- c. Kepala Dusun Jari, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
- d. Ketua Organisasi Kelompok Masyarakat
- e. Tokoh Masyarakat, pengusaha, Komite sekolah
- f. Perangkat Desa Plampang

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun teknik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

#### **a. Observasi**

Menurut Hadari Nawawi (2011:100) bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi

yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas. Dengan dasar teoritis yang mendalam kita lebih sadar akan asumsi-asumsi dan hipotesis untuk di uji kebenarannya berdasarkan observasi yang seobyektif mungkin ( Nasution, 2009 : 110 ). Pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai kriteria (Sugiyono, 2014:309), yaitu sebagai berikut :

1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, artinya peneliti melakukan pengamatan ke lokasi perencanaan infrastruktur yaitu di Desa Plampang.
2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, artinya pengamatan dilakukan oleh peneliti mengacu pada desain penelitian yang telah dibuat sebelum terjuan melakukan pengamatan di lokasi penelitian.
3. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu aset yang menarik perhatian saja, artinya peneliti dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan melakukan analisa data dengan melakukan validasi data yang kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan dari fenomena yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam musrembangdes Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.



## **b. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek peneliti. Kreatifitas pewawancara sangat diperlukan guna memaksimalkan hasil wawancara baik pada saat mencari jawaban, mencatat maupun menafsirkan setiap jawaban.

Peneliti sebelum melakukan wawancara harus menjelaskan tujuan peneliti melakukan wawancara dan keterangan yang peneliti harapkan kepada informan, dalam bahasa dan istilah-istilah yang dapat dipahami dengan mudah oleh informan itu sendiri. Penjelasan itu mengarahkan jalan pikiran informan sehingga tahu apa saja yang akan disampaikannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bersifat verbal dan non verbal, pada umumnya yang diutamakan adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab menggunakan yang berisikan beberapa pernyataan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil wawancara akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki, diubah bila perlu perubahan. Peneliti berhadapan dengan dua hal pada saat wawancara, yaitu

1. Peneliti harus secara nyata mengadakan interaksi dengan informan.
2. Peneliti menghadapi kenyataan, adanya pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan pandangan peneliti sendiri.

Adapun jumlah informan ataupun narasumber yang ditentukan berdasarkan teknik *Purposive Sampling*, yakni orang yang sangat mengetahui perencanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan kondisi dan potensi desa di Desa Plampang, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Informan Ataupun Narasumber di Desa Plampang Tahun 2020**

No	Narasumber	Jumlah (Jiwa)
1	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa (PPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumbawa.	1
2	Kepala Badan Pengawas Desa (BPD) Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.	1
3	Kepala Dusun Karya Jaya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.	1
4	Kepala Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.	1
5	Kepala Dusun Srjari, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.	1
6	Ketua Organisasi Kelompok Masyarakat	6
7	Tokoh Masyarakat, pengusaha, Komite sekolah	7
8	Perangkat Desa Plampang	6
<b>Total</b>		25 Orang

### c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, keterlibatan individu pada suatu komunitas tertentu dalam setting social. Dokumentasi yang dilakukan melalui gambaran pembangunan infrastruktur desa yang telah terbangun, dokumen petunjuk teknis Dana Desa (DD), Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, (MUSRENBANG) Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), dan beberapa dokumen pendukung lainnya.

### **3.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut.

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer diperoleh dari beberapa penjelasan informan melalui wawancara dan pengamatan dilapangan guna memperoleh data yang akurat dalam menunjang hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Perencanaan Pembangunan Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kepala Desa Plampang, Ketua Badan Pengawas Desa (BPD), Kepala Dusun Karya Jaya, Kepala Dusun Karya Mulia dan Kepala Dusun Sejari Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Serta Ketua Organisasi Kelompok Masyarakat

yang terdiri dari Ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Ketua PKK, Ketua Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Ketua Pemuda Desa Plampang, Tokoh Masyarakat, pengusaha, Komite sekolah dan Perangkat Desa Plampang.

### **3.5.2 Data Sekunder**

Survei sekunder merupakan metode pengumpulan data yang lebih spesifik kepada data yang telah tersedia pada instansi – instansi yang sifatnya kepustakaan. Data sekunder dilakukan melalui kunjungan instansional ke Bappeda Kabupaten Sumbawa, Kantor PMD Kabupaten Sumbawa, Kantor Statistik Kabupaten Sumbawa, Kantor PUPR Kabuapten Sumbawa, Kantor Kecamatan Plampang, dan Kantor Desa Plampang.

Adapun dalam kegiatan survei yang dilakukan akan mengacu pada hasil pengumpulan informasi awal pada tahapan persiapan tentang data – data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan penelitian yakni sebagai berikut.

- Kabupaten Sumbawa Dalam Angka Tahun 2018
- Profil Kecamatan Plampang Tahun 2018
- Profil Desa Plampang Tahun 2018
- Data PDRB Kabupaten Sumbawa
- Data PDRB Kecamatan Plampang
- Data Kemiskinan Desa Plampang
- Data Musrembang Desa Plampang Tahun 2018

- Data APBD Desa Plampang Tahun 2018 Data Profil Desa Plampang (Kantor Desa Plampang)
- Data Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (PUPR Kabupsten Sumbawa)
- Data Potensi Desa ((Kantor Desa Plampang))
- RPJM Desa Plampang (Kantor Desa Plampang).

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa dilakukan secara terus-menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (2013), antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key* informan atau responden kapabel yang bisa memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti. Transkrip data (transformasi data) bertujuan untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.



3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing* Atau *Verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya

